

IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI UPPKS (USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA) DI DESA LEREP KECAMATAN UNGARAN BARAT

Nabilla Arsyah Alhukam¹, Martien Herna Susanti²

^{1, 2}Universitas Negeri Semarang, Jl. Raya Banaran, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Email: billaarsya@gmail.com

Article History

Received: 09-07-2026

Revision: 03-08-2026

Accepted: 09-08-2026

Published: 13-08-2026

Abstract. This study aims to describe the implementation of the Quality Family Village (Kampung KB) program through the Prosperous Family Income Enhancement Effort (UPPKS) in Lerep Village, as well as to identify obstacles in its execution. A qualitative approach was employed, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and document analysis. Research informants included program implementers and community members involved in UPPKS activities, while data analysis was conducted interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results indicate that the program has been implemented effectively, contributing to community economic empowerment through the development of local potential-based enterprises. Program success was facilitated by effective communication, resource availability, the commitment of both implementers and the community, and a clear division of tasks, all of which helped enhance business skills and independence. However, challenges remain, including limited capital and production facilities, suboptimal marketing, and uneven community participation. Improvement efforts have been pursued through training, mentoring, digital promotion, MSME exhibitions, and cross-sector collaboration. These findings underscore that the program's success depends not only on the execution of activities but also on resource support, coordination, and sustained mentoring.

Keywords: Implementation, Program, Family Planning Village (Kampung KB), UPPKS.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Lerep serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pelaksana program dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan UPPKS, sedangkan data dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik dan berkontribusi dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Keberhasilan program didukung oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana dan masyarakat, serta pembagian tugas yang jelas sehingga mampu meningkatkan keterampilan dan kemandirian usaha. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan modal dan sarana produksi, pemasaran yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, promosi digital, pameran UMKM, dan kerja sama lintas pihak. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh dukungan sumber daya, koordinasi, dan keberlanjutan pendampingan.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB), UPPKS

How to Cite: Alhukam, N. A & Susanti, M. H. (2026). Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 5362-5377. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.7005>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga. Persoalan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial secara layak. Karena itu, kebijakan pembangunan kependudukan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek demografis, tetapi juga pada penguatan ketahanan dan kemandirian keluarga. Dalam konteks tersebut, pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi kerentanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang dari pendekatan pengendalian penduduk menuju pendekatan pembangunan keluarga yang lebih komprehensif. Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan salah satu bentuk kebijakan yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan pada tingkat masyarakat, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ekonomi keluarga. Kampung KB dipandang sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga yang membutuhkan keterpaduan berbagai sektor agar program dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan (Suharta, 2020). Salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi yang berkaitan dengan program tersebut adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), yang diarahkan pada pengembangan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga.

UPPKS memiliki posisi strategis karena keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program, tetapi juga oleh bagaimana program tersebut diimplementasikan di tingkat lokal. Penelitian mengenai implementasi Kampung KB menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program berkaitan dengan kejelasan tujuan, komunikasi, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat (Lifianti, 2021). Dengan demikian, keberadaan UPPKS di suatu wilayah belum secara otomatis menunjukkan keberhasilan program. Kajian terhadap proses pelaksanaan, bentuk kegiatan, dukungan sumber daya, partisipasi masyarakat, serta hambatan yang muncul diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan Kampung KB. Subekti dan Choiriyah (2022) menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui Kampung KB melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran sekaligus pelaku kegiatan, sementara pelaksanaan program juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat di tingkat lokal.

Penelitian Prasetyo dan Anggaunitakiranantika (2020) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Kampung KB mencakup keterlibatan pada berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga, termasuk UPPKS. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Secara khusus, penelitian mengenai UPPKS menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi keluarga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok sasaran. Penelitian mengenai implementasi UPPKS di Kampung KB Ciganjur, Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa UPPKS diarahkan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan kegiatan usaha produktif (Nurkholifah, 2022). Penelitian yang lebih baru mengenai UPPKA di Kelurahan Keranggan, Kota Tangerang Selatan, juga memperlihatkan bahwa analisis implementasi program perlu memperhatikan program yang dijalankan, pelaksana program, dan kelompok sasaran sebagai unsur yang menentukan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Penelitian terdahulu masih banyak dilakukan pada wilayah perkotaan atau wilayah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Kajian mengenai implementasi UPPKS pada tingkat desa dengan karakteristik potensi ekonomi lokal, kondisi geografis, keterbatasan akses, serta pola partisipasi masyarakat yang spesifik masih perlu diperluas. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi UPPKS dalam konteks desa penting dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga diterjemahkan ke dalam kegiatan konkret dan bagaimana kondisi lokal memengaruhi pelaksanaannya.

Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga. Desa ini memiliki berbagai potensi lokal, antara lain kopi, kolang-kaling, rempah-rempah, serta potensi wisata yang dapat mendukung pengembangan usaha masyarakat. Pelaksanaan Kampung KB di wilayah tersebut juga diarahkan pada penguatan ekonomi keluarga melalui kegiatan UPPKS. Salah satu kelompok yang menjalankan kegiatan tersebut adalah UPPKS “Manggar Lestari” di Dusun Indrokilo. Pemanfaatan potensi lokal melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran produk menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan keluarga. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam, pelaksanaan UPPKS di Dusun Indrokilo menghadapi kondisi yang dapat memengaruhi keberlangsungan program. Letak wilayah yang berada di kawasan perbukitan menyebabkan akses transportasi dan distribusi produk menjadi relatif lebih sulit. Di samping faktor geografis, keberhasilan program juga bergantung pada ketersediaan modal dan sarana produksi, kemampuan pemasaran, koordinasi antar pihak, serta keterlibatan masyarakat dalam

kegiatan usaha. Kondisi tersebut menjadikan Desa Lerep sebagai konteks yang penting untuk dikaji karena keberhasilan implementasi UPPKS tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dan masyarakat menyesuaikan program dengan karakteristik serta potensi lokal.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi Program Kampung KB melalui UPPKS “Manggar Lestari” di Dusun Indrokilo, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis implementasi UPPKS dalam konteks desa yang memanfaatkan potensi ekonomi lokal sekaligus menghadapi keterbatasan geografis dan sumber daya. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menggambarkan keberadaan kegiatan UPPKS, tetapi menganalisis bagaimana program dilaksanakan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta maknanya bagi pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi keluarga di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis implementasi Program Kampung KB melalui UPPKS Manggar Lestari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pelaksanaan program, pengalaman pelaksana dan masyarakat, serta faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program. Analisis implementasi menggunakan teori Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan sebagai fokus dalam penyusunan pedoman wawancara, observasi, pengelompokan data, dan interpretasi temuan. Aspek komunikasi mencakup kejelasan dan penyampaian informasi program serta koordinasi antarpelaksana; sumber daya meliputi sumber daya manusia, modal atau anggaran, sarana prasarana, dan akses pemasaran; disposisi mencakup komitmen, sikap, dan respons pelaksana serta masyarakat; sedangkan struktur birokrasi mencakup pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan prosedur pelaksanaan program.

Penelitian dilaksanakan di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dengan lokasi utama kegiatan UPPKS Manggar Lestari di Dusun Indrokilo. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan program. Informan terdiri atas pemerintah desa, pengelola Program Kampung KB atau UPPKS, serta anggota UPPKS atau masyarakat penerima manfaat. Pemilihan informan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam program, pengetahuan

mengenai kegiatan UPPKS, dan kesediaan memberikan informasi berdasarkan pengalaman. Jumlah informan ditentukan berdasarkan kecukupan informasi hingga data yang diperoleh menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan informasi substantif baru.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, komunikasi, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana dan masyarakat, pembagian tugas, koordinasi, manfaat program, serta hambatan yang dihadapi. Observasi dilakukan terhadap kegiatan UPPKS, aktivitas produksi dan pemasaran, partisipasi masyarakat, pemanfaatan sarana prasarana, serta proses koordinasi antarpelaksana. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa profil desa, dokumen Program Kampung KB, struktur kepengurusan UPPKS, laporan kegiatan, data anggota, dan dokumentasi pelaksanaan program.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemerintah desa, pengelola UPPKS, dan anggota atau masyarakat penerima manfaat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan wawancara lanjutan dan pemeriksaan dokumen untuk memperoleh data yang lebih konsisten. Kredibilitas data juga diperkuat melalui peningkatan ketekunan dalam pengamatan dan penggunaan bahan referensi yang relevan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikondensasi dengan menyeleksi, memberi kode, dan mengelompokkan informasi berdasarkan empat aspek implementasi Edward III serta faktor pendukung dan penghambat program. Data selanjutnya disajikan secara naratif dan tematik untuk menemukan pola implementasi program. Kesimpulan ditarik dan diverifikasi secara berulang dengan membandingkan hasil analisis terhadap data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data sehingga diperoleh temuan yang konsisten dengan fokus penelitian.

HASIL

Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan di Kampung KB Manggar Lestari Dusun Indrokilo Desa Lerep Kabupaten Semarang dengan melakukan wawancara terstruktur dengan 4 (empat) narasumber terpilih yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penelitian.

Tabel 1. Deskripsi informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Status
1	Muhammad Rofi	Pria	Perangkat Desa Lerep
2	Eva	Wanita	Ketua Program Kampung KB
3	Sriyatun	Wanita	Penanggungjawab UPPKS Manggar Lestari
4	Ira Erdhina	Wanita	Masyarakat

Hasil Penelitian

Implementasi Program Kampung KB Melalui UPPKS di Dusun Indrokilo

Program Kampung KB merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya berfokus pada keluarga berencana, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Program kampung KB digagas pertama kali oleh Presiden Indonesia yaitu Bapak Ir. Joko Widodo. Kampung KB di Desa Lerep pertama kali berdiri pada tahun 2016 yang secara khusus berada di salah satu dusun yaitu indrokilo RW 01. Program Kampung KB di desa Lerep secara resmi bernama “Kampung KB Manggar Lestari” yang memiliki keparti nama filosofis untuk "Mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan berdaya melalui program yang tumbuh dari akar masyarakat dan berkelanjutan sepanjang masa."

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan beberapa narasumber, latar belakang dipilihnya dusun Indrokilo sebagai Kampung KB yaitu karena memiliki potensi sumber daya alam dan masyarakat yang aktif. Selain itu, pemerintah melihat adanya peluang untuk mengembangkan pemberdayaan keluarga melalui berbagai program lintas sektor, termasuk UPPKS. Kampung KB Dusun Indrokilo telah melaksanakan program meliputi pembinaan keluarga, BKB, BKR, BKL, pelayanan KB, pelatihan keterampilan, serta salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berfokus pada pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. Perangkat desa Lerep menjelaskan bahwa UPPKS menjadi sarana pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kopi, jahe rempah, gula aren, cengkeh, serta produk olahan lainnya yang memanfaatkan potensi lokal desa. Temuan tersebut diperkuat oleh Ketua Kampung KB yang menyatakan bahwa:

“Salah satu program unggulannya adalah UPPKS yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan usaha produktif.”

Pernyataan dari ketua kampung KB Manggar Sari menyimpulkan bahwa UPPKS merupakan program unggulan dalam Kampung KB yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha produktif berbasis potensi masyarakat setempat. Program ini dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan, pembinaan usaha, serta pendampingan yang

dilakukan secara rutin kepada anggota kelompok. Pelaksanaan UPPKS dilakukan melalui pembentukan kelompok usaha yang melibatkan masyarakat secara sukarela, terutama keluarga yang ingin menambah penghasilan dan mengembangkan usaha. Kegiatan usaha yang dijalankan meliputi produksi kopi bubuk, minuman jahe rempah, gula aren, serta pengembangan desa wisata kuliner sebagai media promosi produk UMKM masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program telah mengarah pada pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Kampung KB dan UPPKS

Berdasarkan hasil penelitian, aspek komunikasi dalam pelaksanaan Program Kampung KB dan UPPKS berjalan dengan cukup baik. Informasi mengenai program disampaikan melalui rapat koordinasi antara pemerintah daerah, PKB, pemerintah desa, kader Kampung KB, dan masyarakat. Selanjutnya informasi diteruskan melalui musyawarah desa, pertemuan RT/RW, kelompok PKK, kader Kampung KB, media sosial desa, serta kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Perangkat desa Lereng mengungkapkan bahwa:

“Informasi disampaikan melalui rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten, PKB, dan instansi terkait, kemudian diteruskan kepada perangkat desa, kader Kampung KB, dan masyarakat. Petunjuk pelaksanaan dan tujuan program dijelaskan secara rinci sehingga pelaksana maupun masyarakat memahami peran masing-masing.”

Perangkat desa, Ketua Kampung KB, maupun anggota masyarakat menyatakan bahwa informasi mengenai tujuan, sasaran, serta pelaksanaan program telah disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Selain itu, informasi yang diberikan dinilai konsisten karena selalu mengacu pada pedoman dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program. Kejelasan informasi membuat masyarakat memahami manfaat program sehingga mendorong partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program Kampung KB dan UPPKS

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program terdiri atas pemerintah desa, PKB, kader Kampung KB, kader PKK, pengurus UPPKS, serta masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan. Menurut Perangkat desa dan Ketua Kampung KB, jumlah kader dan pengelola dinilai cukup memadai serta memiliki komitmen yang baik dalam mendampingi

masyarakat. Selain itu, kader secara rutin memperoleh pelatihan sehingga mampu menjalankan tugas pendampingan dengan baik. Dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas yang tersedia dinilai cukup mendukung pelaksanaan program. Namun demikian, masih diperlukan tambahan peralatan produksi, alat pengemasan, dan sarana pemasaran agar kapasitas usaha masyarakat dapat berkembang lebih optimal. Temuan ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan penanggungjawab pelaksanaan UPPKS Desa Lerep yang mengungkapkan:

”Fasilitas sudah cukup membantu, namun masih diperlukan tambahan peralatan produksi dan alat pengemasan agar kapasitas produksi dapat meningkat.”

Sementara itu, dukungan anggaran berasal dari APBN, APBD, APBDes, bantuan lintas sektor, swadaya masyarakat, serta hasil usaha kelompok. Meskipun demikian, seluruh informan menyatakan bahwa dukungan modal dan anggaran masih menjadi kendala karena kebutuhan pengembangan usaha terus meningkat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia sudah cukup memadai, tetapi sumber daya finansial dan sarana produksi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan program.

Disposisi atau Komitmen Pelaksana Program

Hasil penelitian menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah desa, pengelola Kampung KB, kader, maupun anggota kelompok UPPKS dalam menjalankan program. Pemerintah Desa Lerep juga secara aktif memberikan dukungan berupa pembinaan, pelatihan, fasilitasi promosi produk, dan pendampingan kepada masyarakat. Temuan ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Ketua Program Kampung KB Desa Lerep yang menyatakan bahwa:

“Pengelola dan kader memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan program karena melihat manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.”

Pendapat tersebut didukung juga oleh Ketua Kampung KB menyatakan bahwa pengelola dan kader memiliki komitmen tinggi karena melihat manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut juga terlihat dari antusiasme anggota kelompok UPPKS yang aktif mengikuti pelatihan, kegiatan produksi, dan promosi produk. Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa program diterima dengan baik oleh sasaran program. Dukungan dan komitmen seluruh pihak menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan Program Kampung KB melalui kegiatan UPPKS.

Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan Program Kampung KB dan UPPKS

Pelaksanaan Program Kampung KB dan UPPKS di Desa Lerep telah memiliki pedoman teknis dan SOP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Perangkat desa, Ketua Kampung KB, dan Penanggung Jawab UPPKS menyatakan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian tugas antar pelaksana juga telah berjalan dengan jelas. Pemerintah desa berperan sebagai koordinator dan fasilitator, PKB memberikan pembinaan teknis, pengurus Kampung KB mengoordinasikan program, kader melakukan pendampingan lapangan, sedangkan kelompok UPPKS menjalankan kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Struktur birokrasi yang jelas ini mempermudah koordinasi antar pelaksana sehingga program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dampak Program Kampung KB Melalui UPPKS terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, Program Kampung KB melalui kegiatan UPPKS memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Dusun Indrokilo. Perangkat desa, Ketua Kampung KB, dan Penanggung Jawab UPPKS menyatakan bahwa program telah membantu masyarakat memperoleh tambahan pendapatan melalui usaha yang dikembangkan. Selain itu, masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri secara ekonomi. Masyarakat yang menjadi anggota UPPKS juga mengakui bahwa mereka memperoleh berbagai manfaat, seperti peningkatan keterampilan dalam pengolahan produk, pengemasan, pemasaran, serta tambahan penghasilan dari hasil penjualan kopi dan minuman jahe rempah. Tambahan pendapatan tersebut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Perubahan yang paling terlihat adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha produktif berbasis potensi lokal. Beberapa anggota yang sebelumnya belum memiliki usaha kini mampu menghasilkan produk sendiri dan memperoleh penghasilan tambahan. Temuan ini menunjukkan bahwa UPPKS berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan Program Kampung KB dan UPPKS meliputi dukungan pemerintah desa, kerja sama antaranggota kelompok, potensi sumber daya alam Desa Lerep yang melimpah, serta adanya pelatihan dan pendampingan dari berbagai pihak. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, antara lain keterbatasan modal usaha, keterbatasan anggaran program, pemasaran produk yang belum luas, serta belum

optimalnya partisipasi seluruh masyarakat dalam kegiatan program. Selain itu, kelompok usaha juga menghadapi tantangan berupa persaingan produk dan kebutuhan peningkatan kapasitas produksi ketika permintaan meningkat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa dan pengelola program melakukan berbagai upaya seperti memperluas promosi melalui media digital, mengikuti pameran UMKM, menjalin kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha, serta meningkatkan pelatihan bagi masyarakat agar kualitas produk dan kapasitas usaha semakin berkembang.

Tabel 2. Sintesis hasil implementasi program Kampung KB melalui UPPKS

Dimensi Edward III	Temuan Utama	Bukti Empiris	Kondisi Implementasi
Komunikasi	Informasi mengenai tujuan, sasaran, dan pelaksanaan Program Kampung KB melalui UPPKS disampaikan secara berjenjang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, pengelola Kampung KB, kader, dan masyarakat.	Rapat koordinasi, musyawarah desa, pertemuan RT/RW, kegiatan PKK, sosialisasi, pendampingan kader, dan media sosial desa digunakan sebagai saluran komunikasi. Informan menyatakan bahwa informasi program relatif jelas dan mudah dipahami.	Cukup baik. Penyampaian informasi telah mendukung pelaksanaan program, tetapi sosialisasi dan informasi terkait pengembangan usaha serta pemasaran masih perlu diperluas kepada masyarakat yang belum aktif.
Sumber Daya	Pelaksanaan program didukung oleh pemerintah desa, PKB, kader Kampung KB, kader PKK, pengurus UPPKS, dan masyarakat. Namun, sumber daya finansial dan sarana produksi masih terbatas.	Tersedia pelatihan, pendampingan, dan fasilitas dasar. Sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD, APBDes, bantuan lintas sektor, swadaya masyarakat, dan hasil usaha. Pengelola masih membutuhkan tambahan peralatan produksi dan pengemasan serta modal usaha.	Cukup memadai. Sumber daya manusia relatif mendukung, tetapi keterbatasan modal, anggaran, peralatan produksi, dan sarana pengemasan menjadi kendala pengembangan usaha.
Disposisi/Komitmen	Pelaksana program menunjukkan komitmen dalam menjalankan kegiatan dan mendampingi masyarakat. Anggota UPPKS juga menunjukkan keterlibatan dalam pelatihan, produksi, dan promosi produk.	Dukungan pemerintah desa berupa pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi promosi. Pengelola dan kader aktif mendampingi kelompok, sedangkan anggota mengikuti kegiatan usaha produktif.	Baik. Komitmen pelaksana dan anggota menjadi faktor pendukung keberlanjutan program, meskipun partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata.
Struktur Birokrasi	Pembagian tugas dan tanggung jawab antaraktor telah tersedia dan menjadi	Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, PKB memberikan pembinaan teknis, pengelola	Baik. Pembagian tugas relatif jelas dan mendukung koordinasi, tetapi

	dasar koordinasi pelaksanaan program.	Kampung KB mengoordinasikan kegiatan, kader melakukan pendampingan, dan kelompok UPPKS menjalankan kegiatan usaha.	jejaring kerja sama untuk pengembangan pemasaran dan perluasan pasar masih perlu diperkuat.
Dampak terhadap anggota UPPKS	Program memberikan manfaat terutama dalam bentuk peningkatan keterampilan, kapasitas usaha, dan tambahan pendapatan bagi anggota yang aktif mengikuti kegiatan.	Anggota memperoleh keterampilan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk serta memperoleh tambahan pendapatan dari usaha seperti kopi dan jahe rempah.	Memberikan manfaat positif. Namun, peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan belum dapat dinyatakan secara kuantitatif karena penelitian tidak mengukur perubahan pendapatan atau indikator kesejahteraan sebelum dan sesudah program.
Faktor pendukung dan penghambat	Dukungan pemerintah, komitmen pelaksana, kerja sama kelompok, potensi lokal, serta pelatihan menjadi faktor pendukung. Keterbatasan modal, sarana produksi, pemasaran, partisipasi masyarakat, dan kondisi geografis menjadi hambatan.	Hasil wawancara dan observasi menunjukkan adanya dukungan lintas pihak sekaligus kendala dalam produksi, distribusi, pemasaran, dan keterlibatan masyarakat.	Program berjalan cukup baik dengan beberapa kendala. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui promosi digital, pameran UMKM, kerja sama lintas pihak, serta peningkatan pelatihan dan pendampingan.

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian.

DISKUSI

Implementasi Program Kampung KB melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Dusun Indrokilo, Desa Lerep, secara umum menunjukkan bahwa program telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan keterampilan dan usaha ekonomi berbasis potensi lokal. Namun, keberhasilan tersebut tidak berlangsung secara seragam pada seluruh aspek implementasi. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi Edward III, temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi relatif mendukung pelaksanaan program, sedangkan aspek sumber daya masih menjadi faktor yang membatasi optimalisasi program. Dengan demikian, hasil penelitian pada dasarnya mendukung teori Edward III, tetapi sekaligus

menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya yang belum memadai dapat membatasi dampak positif dari komunikasi, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang telah berjalan baik.

Pada dimensi komunikasi, temuan penelitian cenderung sepenuhnya mendukung teori Edward III. Informasi mengenai tujuan, sasaran, mekanisme, dan kegiatan Program Kampung KB melalui UPPKS disampaikan melalui rapat koordinasi, musyawarah desa, pertemuan RT/RW, kegiatan PKK, kader Kampung KB, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat. Informasi yang diterima oleh pelaksana dan kelompok sasaran juga relatif konsisten karena mengacu pada pedoman pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi kebijakan telah berjalan dengan baik. Hal ini penting karena program pemberdayaan yang melibatkan banyak aktor membutuhkan pemahaman yang sama mengenai tujuan dan pembagian peran. Temuan ini sejalan dengan Astari dan Tijan (2022) yang menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas dan tepat sasaran menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi program pemberdayaan melalui UPPKS. Dengan demikian, dalam konteks Desa Lereng, tidak ditemukan persoalan komunikasi yang secara signifikan menghambat pelaksanaan program. Komunikasi yang baik bahkan menjadi modal awal bagi terbentuknya koordinasi antara pemerintah, pengelola program, dan masyarakat.

Pada dimensi sumber daya, temuan penelitian hanya sebagian mendukung teori Edward III. Dari sisi sumber daya manusia, program telah didukung oleh pemerintah desa, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), kader Kampung KB, kader PKK, pengurus UPPKS, dan masyarakat. Pelatihan serta pendampingan juga telah diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah produk, melakukan pengemasan, dan memasarkan hasil usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan kemampuan pelaksana relatif mendukung implementasi program. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kecukupan sumber daya finansial dan sarana produksi. Keterbatasan modal, peralatan produksi, alat pengemasan, dan sarana pemasaran masih menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas usaha. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan sumber daya manusia yang memadai belum secara otomatis menghasilkan implementasi yang optimal apabila tidak didukung sumber daya material dan finansial yang mencukupi. Dengan demikian, hasil penelitian memperkuat asumsi Edward III mengenai pentingnya sumber daya, sekaligus menunjukkan bahwa aspek sumber daya merupakan titik lemah dalam implementasi UPPKS di Dusun Indrokilo. Temuan tersebut sejalan dengan Sagita dan Arif (2024) yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan mengurangi hasil yang hendak dicapai.

Pada dimensi disposisi atau komitmen pelaksana, hasil penelitian cenderung mendukung teori Edward III. Pemerintah desa, pengelola Kampung KB, kader, dan anggota kelompok UPPKS menunjukkan sikap positif terhadap program. Komitmen tersebut terlihat dari keterlibatan dalam pelatihan, pendampingan, produksi, dan pemasaran produk. Dukungan pelaksana tidak hanya ditunjukkan melalui pernyataan, tetapi juga melalui keterlibatan mereka dalam aktivitas program. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap program telah berkembang menjadi tindakan nyata. Kondisi tersebut penting karena kebijakan yang memiliki sumber daya memadai tetap dapat mengalami hambatan apabila pelaksana tidak memiliki kemauan untuk menjalankannya. Temuan ini sejalan dengan Ibad dan Megawati (2024) serta Rahim dan Gazali (2023) yang menempatkan komitmen dan sikap pelaksana sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, disposisi pelaksana menjadi salah satu kekuatan utama dalam pelaksanaan UPPKS di Desa Lerep.

Meskipun demikian, tingginya komitmen pelaksana belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan struktural berupa keterbatasan modal, sarana produksi, dan akses pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi yang positif tidak dapat berdiri sendiri. Komitmen pelaksana perlu didukung oleh sumber daya yang memadai agar dapat dikonversi menjadi peningkatan kapasitas usaha yang lebih besar. Temuan ini memberikan nuansa terhadap teori Edward III bahwa faktor-faktor implementasi tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi. Dalam konteks penelitian ini, komitmen pelaksana berperan mempertahankan keberlangsungan program, tetapi keterbatasan sumber daya membatasi skala dan hasil pengembangannya.

Pada dimensi struktur birokrasi, temuan penelitian juga cenderung mendukung teori Edward III. Pelaksanaan Program Kampung KB dan UPPKS telah memiliki pedoman teknis dan pembagian tugas yang relatif jelas. Pemerintah desa berperan sebagai koordinator dan fasilitator, PKB memberikan pembinaan teknis, pengelola Kampung KB mengoordinasikan kegiatan, kader melakukan pendampingan, sedangkan kelompok UPPKS menjalankan kegiatan usaha produktif. Kejelasan tersebut membantu mengurangi tumpang tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi antaraktor. Keberadaan pedoman dan pembagian tugas menunjukkan bahwa implementasi program tidak hanya bergantung pada inisiatif individu, tetapi telah memiliki mekanisme organisasi yang menjadi acuan bersama. Temuan ini sejalan dengan Rahim dan Gazali (2023) yang menegaskan bahwa kejelasan struktur, pembagian kewenangan, dan koordinasi diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan.

Struktur birokrasi yang telah terbentuk belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan implementasi di tingkat kelompok usaha. Hambatan seperti keterbatasan modal, pemasaran, dan sarana produksi masih ditemukan meskipun pembagian tugas antaraktor telah jelas. Artinya, struktur organisasi yang baik mampu memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan, tetapi tidak secara otomatis menjamin tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa dukungan struktural perlu diikuti dengan penguatan kapasitas dan sumber daya agar implementasi program dapat menghasilkan manfaat yang lebih optimal.

Jika keempat dimensi tersebut dipertautkan, terlihat bahwa komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi relatif mendukung, sedangkan sumber daya belum sepenuhnya mendukung. Kondisi ini menjelaskan mengapa Program Kampung KB melalui UPPKS tetap berjalan dan memberi manfaat, tetapi belum optimal dalam pengembangannya. Komunikasi yang jelas, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang tertata membantu keberlangsungan program, namun keterbatasan modal, sarana produksi, dan pemasaran membatasi peningkatan skala usaha. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya mengonfirmasi teori Edward III, tetapi juga menunjukkan keterkaitan antardimensi dalam praktik implementasi.

Dari sisi dampak terhadap kesejahteraan, UPPKS berkontribusi terutama melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, seperti keterampilan mengolah produk, pengemasan, pemasaran, dan tambahan pendapatan. Namun, peningkatan kesejahteraan dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan ukuran kuantitatif pendapatan, karena data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UPPKS di Dusun Indrokilo telah memberikan arah pemberdayaan ekonomi yang positif, tetapi keberlanjutan dan perluasan manfaat program masih membutuhkan penguatan sumber daya. Prioritas pengembangan tidak hanya berupa peningkatan jumlah kegiatan, tetapi juga penyediaan modal usaha, peralatan produksi, penguatan kapasitas pengemasan, dan perluasan akses pemasaran. Strategi tersebut penting agar kekuatan komunikasi, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang telah terbentuk dapat menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan di Kampung KB Manggar Lestari di Dusun Kemloko, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Implementasi Program Kampung KB dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui UPPKS di Desa Lerep telah berjalan cukup baik. Program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan usaha produktif berbasis potensi lokal, seperti pengolahan kopi, jahe rempah, dan gula aren. Pelaksanaan program didukung oleh komunikasi yang baik, sumber daya manusia yang memadai, komitmen pelaksana dan masyarakat, serta pembagian tugas yang jelas. Program ini mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian ekonomi, dan pendapatan masyarakat.
- Pelaksanaan Program Kampung KB melalui UPPKS mengalami beberapa hambatan yang meliputi keterbatasan modal dan anggaran, kurangnya sarana produksi, pemasaran produk yang belum luas, serta belum optimalnya partisipasi seluruh masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah desa dan pengelola program melakukan pelatihan, pendampingan, promosi melalui media digital dan pameran UMKM, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung pengembangan usaha masyarakat

REKOMENDASI

- Bagi Pemerintah Desa Lerep dan Pengelola Program Kampung KB; Perlu meningkatkan dukungan terhadap kelompok UPPKS melalui penambahan bantuan modal usaha, penyediaan sarana produksi yang lebih memadai, serta memperluas akses pemasaran produk agar usaha yang dijalankan masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
- Bagi Masyarakat dan Kelompok UPPKS; Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan komitmen dalam mengikuti kegiatan UPPKS, memanfaatkan pelatihan yang diberikan untuk mengembangkan keterampilan usaha, serta lebih aktif memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi dan pemasaran produk.

REFERENSI

- Anjeli, P., & Ratnasari, W. G. P. (2024). Implementasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Ranca Bulan di Kelurahan Keranggan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Kommunity Online*, 5(1). <https://doi.org/10.15408/jko.v5i1.38947>
- Astari, M. I., & Tijan. (2022). Implementasi kebijakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang. *Unnes Political Science Journal*, 6(1), 11–14. <https://doi.org/10.15294/upsj.v6i1.48968>

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah penduduk pertengahan tahun (ribu jiwa), 2022–2024*.
- Ibad, D. A., & Megawati, S. (2024). Program Keluarga Berencana: Studi implementatif terhadap pendekatan komunikasi publik “Edward III” di Kota Kediri. *Publika*, 12(3), 871–878. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p871-878>
- Lifianti, K. A. (2021). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. *JISP: Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i1.7>
- Maipita, I. (2014). *Mengukur kemiskinan & distribusi pendapatan*. UPP STIM YKPN.
- Nurkholifah, E. (2022). *Implementasi program UPPKS Bougenville sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga di Kampung KB Ciganjur Jakarta Selatan* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Prasetyo, J. A., & Anggaunitakiranantika, A. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga sejahtera di Kampung KB. *Sosietas*, 10(2).
- Rahim, I., & Gazali. (2023). Analisis implementasi kebijakan Program Kampung Keluarga. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 1–18.
- Rusli, Z., Handi, R., & Sujianto. (2020). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 89–95. <https://doi.org/10.46730/jiana.v18i2.7934>
- Sagita, N. G., & Arif, L. (2024). Program Kampung Keluarga Berkualitas untuk kemandirian. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 408–415.
- Sari, M. (2017). *Pelayanan KB*. BKKBN.
- Subekti, S. P., & Choiriyah, I. U. (2022). Participation in community empowerment through the Kampung KB program. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1254>
- Suharta, R. (2020). Kampung KB: Sebuah model pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga. *Jurnal Riset Daerah*, 20(khusus). <https://doi.org/10.64730/jrdbantul.v20ikhusus.34>
- Tanti, N. P. (2021). *Implementasi program Kampung KB dalam pendapatan keluarga sejahtera Kecamatan Medan Tembung* [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (1992).